MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERBATASAN RAWAN KONFLIK

Sujianto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Model Policy Development and Empowerment Areas Prone Border Conflict. The purpose of this study was to develop and formulate a model of development and empowerment policies such as whether to reduce conflicts community conflict prone areas in Riau Province. To answer this question, it is theoretically possible to use approach to policy model . The model adopted is to use the concept of combination and performs elaboration of policy models that correspond with the issue of development and empowerment in every area of the border. Therefore, this research method designed using mixed methods approach that is both qualitative and quantitative. Intake of this method is to complement one method to another method. The results showed the border area into a mirror and becomes a symbol of strength and prosperity of a region. The stability and prosperity of the border area into a region the size of the welfare and harmony of the region concerned. Because it takes understanding securing border areas in relation to the sovereignty of the region/country can be interpreted that the threat to the region or island in the border area countries means also a threat to the integrity and sovereignty of the country.

Abstrak: Model Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kawasan Perbatasan Rawan Konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun dan merumuskan model kebijakan pengembangan dan pemberdayaan seperti apakah yang dapat meredam konflik masyarakat kawasan rawan konflik di Provinsi Riau. Untuk menjawab persoalan ini, secara teori digunakan pendekatan model kebijakan. Model yang diterapkan adalah menggunakan konsep kombinasi dan melakukan elaborasi dari model-model kebijakan yang sesuai dengan persoalan pengembangan dan pemberdayaan yang ada di setiap daerah diperbatasan. Oleh karenanya, metode penelitian ini didisain dengan menggunakan pendekatan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan metode ini adalah untuk saling melengkapi antara satu metode dengan metode yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan daerah perbatasan menjadi cermin dan sekaligus menjadi simbol kekuatan dan kesejahteraan suatu daerah. Kestabilan dan kesejahteraan daerah perbatasan menjadi ukuran daerah kesejahteraan dan keharmonisan daerah yang bersangkutan. Karena itu diperlukan pemahaman pengamanan daerah perbatasan dalam kaitannya dengan kedaulatan daerah/negara dapat diartikan bahwa ancaman terhadap satu daerah ataupun pulau di daerah perbatasan negara berarti pula ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara.

Kata Kunci: motivasi, kepuasan kerja, disiplin kerja, kinerja pegawai

PENDAHULUAN

Reformasi manajemen pemerintahan awal mula diharapkan dapat melibatkan tiga komponen (*stakeholders*), yaitu negara, masyarakat dan swasta. Setiap komponen ditentukan kadar peranan masing-masing sesuai dengan paradigma pembangunan yang digunakan. Paradigma pembangunan ini beriringan dengan perubahan paradigm pemerintahan, yaitu menuntut adanya keseimbangan dengan tanggung jawab yang sama untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Namun disayangkan konsep pembangunan diterapkan di negara berkembang banyak mengalami kegagalan.

Konsep pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebenarnya bukan benda

baru. Ia ada semenjak manusia itu hidup berkelompok, mereka sudah saling tukar menukar keperluan hidup sehari-hari. Sejak itulah sosial budaya, sosial ekonomi dan politik yang tadinya dilakukan oleh masyarakat atau negara diambil alih oleh pemerintah. Akibatnya segala urusan masyarakat yang mestinya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat semuanya diambil alih oleh pimpinan dengan mengatasnamakan demi negara dan masyarakat. Pada konsteks ini diajukan satu pandangan yang boleh menukar fikiran tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengajukan konsep model kebijakan pengembangan dan pemberdayaan kawasan perbatasan rawan konflik untuk menuju masyarakat mandiri di Provinsi Riau.

Kesenjangan ekonomi dapat terjadi kerana adanya ketidakseimbangan penguasaan atau pemilikan pelbagai sumber daya produksi dan produktivitas antara pelaku ekonomi. Kelompok masyarakat dengan pemilikan faktor produksi terbatas dan produktivitas rendah yang menghasilkan tingkat kesejahteraan rendah dihadapan pada kelompok pelaku ekonomi maju, modern, berkembang dan kuat. Kesenjangan yang melebar menyebabkan terjadinya dikotomi antara pelaku ekonomi yang kuat dengan pelaku ekonomi lemah. Akhirnya bermuara pada adanya konflik yang semula bersifat horizontal berubah menjadi konflik vertikal.

Kebijakan pemberdayaan yang pernah dilakukan di Negara ini antara lain: Program Pembangunan Wilayah (PPW) kemudian diubah menjadi PPW terpadu (P2WT) program ini dilaksanakan pada awal pelita satu sampai pada Pelita dua. Kemudian memasuki pelita tiga dan empat dilaksanakan Program Bantuan Desa melalui INPRES DESA, selanjutnya IDT (Inpres Desa Tertinggal) pada akhir tahun 1997 sampai 1998/ 1999 dibentuk lagi jaringan pengaman sosial (JPS) keseluruhan program ini belum ada yang dapat mengentaskan kemiskinan, bahkan menjadi warga masyarakat sebagai warga yang tergantung dengan belas kasihan pemerintah. Pada masa Pemerintahan Reformasi diadakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP, 2008) kemudian diteruskan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, 2012,13 dan 2014). Namun semua program itu belum ada wujud nyata untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desap-desa. Bahkan ada kecenderungan timbulnya kecemburuan dan akibatnya timbul konflik yang bersifat vertikal dan horizontal.

Pelaksanaan kebijakan atau program pemberdayaan yang digunakan oleh pemerintah adalah menggunakan model *top down* yang melihat sesuatu itu dalam posisi yang di bawah dan menerima. Kemudian, terkesan masalah yang dihadapi setiap kelompok masyarakat itu sama. Akibatnya satu kebijakan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperanan sebagai dokter umum, dengan menggunakan satu obat

dapat menyembuhkan pelbagai penyakit masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan merubah sikap dan pandangan dalam usaha mengembangkan dan pemberdayaan pada masyarakat. Macam-macam model yang dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan dan mengimplemengtasikan kebijakan.

Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan model "*top down*", walaupun usaha yang dilakukan dengan menggunakan strategi "*bottom up*". Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan pemerintah pusat telah membuat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Petunjuk itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah sampai kepada Peraturan Menteri. Akibatnya pelaksana di lapangan hanya sebagai operator bukan eksekutor. Keadaan ini mengakibatkan pelaksana lapangan terbelenggu oleh peraturan, mereka tidak dapat untuk melakukan inovasi, kreativitas untuk melakukan proses interaksi, adaptasi dan integrasi antara kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dengan kondisi di lapangan. Usaha inovasi dan kreativitas untuk melakukan adaptasi dianggap suatu penyimpangan dan akibatnya pelaksana lapangan dihadapkan pada masalah hukum. Kondisi ini memperlambat jalan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pencapaian target dan tujuan (*goals*) sesuai dengan sasaran (objektif) yang ditetapkan sebelumnya (tinjauan dari administrasi dan kebijakan).

Untuk melakukan pemberdayaan diperlukan model. Model adalah penyederhanaan dari realitas yang diwakili. Model ada dua wujudnya yaitu konkrit yaitu reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik atau nyata. Abstrak yaitu penyederhanaan fenomena sosial dalam bentuk gagasan atau konsep yang dinyatakan dalam bentuk teori, simbol atau gambar. Menurut Conyers (1984) model kebijakan itu memiliki beberapa aspek agar model dapat mewakili realitas yang ada pada masyarakat. Conyers menegaskan bahwa semakin mabanyak model semakin baik sesuatu model. Integrasi model dalam suatu kebijakan dimungkinkan untuk dilakukan. Seterusnya ditegaskan bahwa model

yang baik apabila mampu untuk mentransformasikan aspek-aspek.

Berdasarkan model-model kebijakan yang dikemukakan tersebut belum ada satu model yang dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Setiap daerah dan setiap masalah yang ada di masyarakat mempunyai model yang spesifik, oleh karenanya diperlu adanya integrasi model dan pengembangan model dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Persoalan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di perbatasan kawasan rawan konflik menunjukkan adanya persinggungan budaya, sosial, politik dan ekonomi. Konflik yang terjadi di daerah ini disebabkan adanya kliem dari satu pihak kepada pihak lain terhadap sumberdaya yang ada di kedua belah pihak. Usaha untuk menguasai itulah yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang berakibat konflik. Jadi model untuk kajian ini akan berkembang sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat.

Peningkatan daya saing masyarakat di perbatasan harus bersumber dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan tidak bisa melalui cara lain. Proteksi untuk sementara masih bisa digunakan untuk menopang daya saing di pasar dalam kawasan perbatasan. Kekuatan masyarakat perbatasan diawali dengan adanya proteksi dari pemerintah atau pihak yang berwenang, proteksi itu tidak boleh berkepanjangan. Ia harus mempunyai batas waktu penyapihan, agar mempunyai daya untuk mengatasi masalah sendiri menuju kemandiriannya. Artinya proses proteksi pada masyarakat perbatasan itu digunakan menjelang mereka masih kecil dan belum mempunyai kekuatan ekonomi sendiri, namun ketika mereka sudah mempunyai kekuatan ekonomi maka proteksi harus segra dilepaskan. Jadi secara otomatis ketika mereka sudah besar akan terjadi imbas ekonomi yang dilakukan kepada masyarakat yang lainnya.

Strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Strategi itu masih ditempuh karena memang terbukti kebenarannya. Namun dalam jangka panjang upaya yang lebih kuat perlu diarahkan untuk perubahan pandangan dan mendorong percepatan perubahan structural

(*structural transformation*) untuk memperkuat masyarakat di perbatasan untuk menjaga wilayah masing-masing.

Transformation structural ini seperti proses perubahan pandangan masyarakat dari berorientasi ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian untuk kawasan perbatasan yang dianggap rawan konflik. Perubahan *structural* serupa ini mengisyaratkan langkah-langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Strategi ini akan dapat membangkitkan masyarakat yang ada di perbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya.

Strategis harus ditempuh untuk pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan rawan konflik. Diantaranya yang penting adalah: *Pertama*, peningkatan akses kepada asset produksi (*productive assets*). *Kedua*, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusi. *Keempat*, kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat. Industri rakyat, yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional. *Kelima*, pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebar di daerah perbatasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan melihat pandangan atau persepsi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan terhadap pemerintah kabupaten begitu sebaliknya. Persepsi yang dimaksudkan di sini adalah padangan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah kabupaten di kawasan perbatasan. Untuk memudahkan pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kualitatif

diperoleh melalui observasi dan wawancara, data kuantitatif diperoleh melalui modifikasi data yang menggunakan skala Likert dengan menggunakan skor, alat yang digunakan adalah anget. Untuk melihat keabsahan data digunakan teknik triangulasi dan menggunakan metode analisis gabungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan negara maupun perbatasan daerah merupakan penjelmaan daripada kedaulatan bangsa atau daerah dalam bangsa atau negara yang bersangkutan. Perbatasan juga mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada. Selain itu juga perbatasan sebagai batas wilayah untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Keamanan dan pertahanan daerah dapat dijaga apabila masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Strategi untuk mempertahankan daerah perbatasan daripada praktik kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan diperlukan penyusunan perencanaan pengembangan di daerah tersebut. Penyusunan perencanaan pengembangan masyarakat perbatasan ini berkaitan dengan masalah: Sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan pertahanan keamanan.

Penyusunan Pengembangan Daerah Perbatasan

Kabupaten/kota yang ada di bawah administratif pemerintahan Provinsi Riau langsung berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia) adalah: Kabupaten Bengkalis, sedangkan kabupaten/kota yang berbatasan dengan provinsi tetangga yang berada di wilayah perairan adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan. Kedua daerah ini secara geografis merupakan pintu gerbang untuk daerah bahagian timur Provinsi Riau. Dengan kata lain kemajuan dan kemunduran daripada pembangunan Provinsi Riau secara menyeluruh tercermin daripada kemajuan kedua-dua kabupaten tersebut.

Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan bila dilihat daripada topografinya agak berbeda, hanya daerah-daerah tertentu saja yang mempunyai kesamaan seperti: Kecamatan Guntung, Mandah, Gaung Anak Serka untuk daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Kerumutan, Teluk Meranti, dan Kuala Kampar.

Penyusunan dan Pengembangan Nilai-nilai Lokal kepada Masyarakat Perbatasan

Penyusunan pembangunan daerah khususnya di daerah kecamatan sampel seperti: Kecamatan Kuala Kampar, Kerumutan, Mandah dan Gaung Anak Serka (GAS) pada hakekatnya merupakan pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan daerah secara nasional. Agar masyarakat di daerah perbatasan ini tidak terlanjur mencintai negara atau daerah tetangga, perlu ditanamkan nilai-nilai lokal yang mendukung pembangunan cinta daerah. Oleh itu, pembangunan yang strategis adalah pembangunan yang mengutamakan pembangunan nilai-nilai. Ada tiga seperti; Nilai-nilai strategis itu adalah :

1. Penanaman diri akan semangat cinta bangsa dan tanah air dan berikan kemudahan kepada masyarakat di daerah perbatasan.
2. Kunggulan dijadikan daya tarik dan pembukaan lapangan pekerjaan daerah sehingga masyarakat tidak ke luar negeri/ daerah.
3. Nilai yang perlu mendapat perhatian serius adalah nilai rasa aman dan ketertiban daerah agar tidak mendapat gangguan yang berarti.

Keadaan geografis daerah perbatasan yang ada di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan. Kedua-dua daerah berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kedua kabupaten ini dipisahkan dengan selat Malaka yang terdiri daripada perairan, begitu juga dengan daerah perbatasan lainnya. Sedangkan di daratan batas wilayah antara satu dengan yang lain belum begitu jelas. Oleh itu, setiap pemerintah daerah perlu untuk menjaga dan memelihara hubungan yang harmoni di antara mereka.

Pandangan Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan

Pengembangan dan pembinaan pada masyarakat perbatasan akan memberikan penguatan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan ideologi negara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan mempunyai akses berinteraksi yang cepat kepada masyarakat daerah tetangga atau negara tetangga. Keadaan ini akan memudahkan penyerapan dan penerimaan ideologi dan politik dari luar. Hal ini disebabkan keadaan di daerah tetangga atau negara tetangga lebih maju bila dibandingkan dengan daerah sendiri. Selain menanamkan nilai-nilai lokal dan nasional, pemerintah juga perlu menata politik di daerah perbatasan secara benar, hindari nilai-nilai dan praktik politik yang tidak beretika. Pada masa reformasi isu lokal seperti primodialisme, nepotisme, ego lokal sangat kental sekali, sementara di daerah perbatasan itu masyarakatnya bersifat heterogen. Keadaan ini perlu ditata dan dikembalikan pada jalur yang benar, jangan sampai satu kelompok merasa memiliki satu kawasan dan kelompok lain merasa menjadi kelompok nomor dua tiga dan seterusnya (marginal).

Keadaan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan rata-rata mempunyai kemiripan. Mereka pada umumnya melakukan kegiatan ekonomi konvensional seperti bertani, nelayan. Sedangkan pekerjaan yang bersifat penyedia jasa seperti berdagang, tukang, angkutan dan telekomunikasi sangat sedikit yang berhikmat. Masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan lebih banyak melakukan interaksi sosial ekonomi kepada masyarakat yang ada di daerah tetangga atau negara tetangga. Sosial budaya masyarakat perbatasan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang informasi dan komunikasi. Kedua hal ini dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat di perbatasan.

Satragi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan adalah melalui pendekatan partisipatif dari masyarakat itu sendiri. Dengan tujuan untuk membuka dan mendekatkan hubungan antara daerah perbatasan dengan daerah pemerintahan induk. Selama ini, pandangan

pemerintahan sama ada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memandang daerah perbatasan adalah sebagai daerah tertinggal. Akibat salah pandangan ini, maka daerah perbatasan menjadi daerah terisolir dan tertinggal. Satragi berikutnya adalah pemerintah daerah (induk) perlu membuat pandangan bahwa daerah perbatasan sebagai beranda atau teras daripada daerah tersebut. Sebagai daerah teras maka wajah daripada daerah perbatasan mesti lebih cantik daripada daerah yang di belakang. Sehingga ia akan memperoleh dukungan dan kontribusi dari segenap komponen masyarakat dalam keuletan dan ketangguhan di seluruh wilayah perbatasan.

Strategi berikutnya adalah pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan melalui dua paradigma iaitu; Paradigma ekonomi yang mengarah pada ekonomi lokal dan paradigma pendekatan politik lokal. Kedua-dua paradigma ini saling berkaitan, dengan asumsi apabila keperluan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi maka masyarakat akan berorientasi pada pemerintah iduknya, tetapi apabila keadaan itu tidak terpenuhi maka mereka akan mencari induk yang mampu memberikan manfaat kepada mereka secara ekonomi dan politik.

Kedua-dua paradigma itu sebagai landasan untuk implementasi program-program pembangunan yang integratif, adaptif dan kondusif. Program pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan ini diarahkan untuk:

1. Memacu pemerataan pembangunan di daerah perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan, partisipasi aktif masyarakat di daerah perbatasan dan mengaktualisasikan sumberdaya yang ada, sesuai dengan semangat otonomi daerah.
2. Wujudkan kehidupan masyarakat daerah perbatasan yang setara dengan daerah-daerah lainnya.

Strategi pengembangan daerah perbatasan adalah seperti berikut:

1. Mewujudkan pengembangan daerah perbatasan yang meliputi penggunaan sumberdaya alam yang sesuai dengan keperluan masyarakat daerah, melakukan inventarisasi semua kekayaan yang ada di daerah perbatasan.

2. Adanya jaminan kesejahteraan masa depan masyarakat terhadap kabupaten induk atau pemerintahan induk sehingga mereka mencintai dan berorientasi pada daerah induk.
3. Adanya jaminan yang tegas terhadap pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang hak otonomi daerah dan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2002 bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.

SIMPULAN

Daerah perbatasan adalah daerah yang paling strategis dalam satu daerah kabupaten/kota, provinsi atau negara sekalipun. Daerah perbatasan mempunyai nilai-nilai strategis dalam mendukung Keberhasilan pembangunan regional dan nasional. Daerah perbatasan menjadi cermin dan sekaligus menjadi simbiol kekuatan dan kesejahteraan satu daerah. Kestabilan dan kesejahteraan daerah perbatasan menjadi ukuran daerah kesejahteraan dan keharmonisan daerah yang bersangkutan. Oleh itu diperlukan pemahaman pengamanan daerah perbatasan dalam kaitannya dengan kedaulatan daerah/negara dapat diartikan bahwa ancaman terhadap satu daerah ataupun pulau di daerah perbatasan negara berarti pula ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Pengamanan perbatasan negara dalam menjaga kedaulatan daerah/negara saat ini masih kurang optimal dilakukan terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran lintas batas (darat, laut dan udara) yang dilakukan pihak asing dengan berbagai alasan adalah bukti kurang optimalnya pengamanan perbatasan negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Agnes Sunatiningsih, 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Bamabang Rudito, Adi Prasetijo, Kusairi, 2003. *Akses Peran Serta Masyarakat, Lebih Jauh Memahami Community Development*. Jakarta: ICSD
- Edi Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media
- Iwan Nugroho, Rokhmin Dahuri, 2012. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Isbandi Rukminto Adi, 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: LP FE UI
- Khairul Muluk, 2003. *Perkembangan Pemerintahan Daerah: Perbandingan AS dan Indonesia*, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. III, No. 2 Maret 2003.
- Rachmad Syafa'at, Saafroedin Bahar, I Nyoman Nurjana, Edi Susilo, dan Iman Kuswahyono, 2008. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Malang: In-Trans Publishing
- Rr. Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid (eds), 2005. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pasantren
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antithesis?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.